BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat penghubung yang sangat penting untuk komunikasi antara pengelola dan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan sangat dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2017 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, "laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi, di mana nantinya dijadikan sebagai sumber informasi dalam menilai kinerja suatu organisasi. Laporan keuangan dalam suatu entitas sangat memiliki pengaruh pada informasi manajemen, yang mana pada setiap periode akuntansi laporan keuangan harus disampaikan guna mengetahui bagaimana perkembangan entitas baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran, serta posisi keuangan yang lainnya di mana saling berhubungan dengan informasi keuangan

UNMAS DENPASAR

perusahaan. Laporan keuangan adalah pernyataan dalam komponen laporan keuangan entitas pelapor yang merupakan pertanggung jawaban manajemen keuangan selama suatu periode.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban suatu organisasi profit adalah penyusunan laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari berbagai pertimbangan, hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan dapat terlihat lebih baik dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang, keputusan kontrak yang berdasarkan kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan. Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat di perbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pada perusahaan maupun pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Di Dalam laporan keuangan terdapat pihak yang memanfaatkan laporan keuangan adalah investor, karyawan, debitur, dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.

UNMAS DENPASAR

Laporan keuangan adalah semua metode yang digunakan oleh bisnis untuk menyampaikan informasi keuangan. Dengan kata lain, ruang lingkup laporan keuangan (financial statement) lebih luas dari pada laporan keuangan (financial statement), yang merupakan notabene informasi keuangan suatu organisasi untuk suatu jangka waktu yang bisa dipakai melukiskan operasi suatu bisnis. Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Tentunya dalam setiap lembaga keuangan menginginkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh bendahara keuangannya berupa laporan keuangan yang berkualitas karena dapat berpengaruh bagi kemajuan lembaga keuangan itu sendiri. Laporan keuangan yang dihasilkan akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam laporan keuangan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Dalam menyusun sebuah laporan keuangan berkualitas, terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus diperhatikan, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Demi tersusunnya laporan keuangan dengan empat karakteristik kualitatif tersebut, maka diperlukannya peran *human capital* dengan modal yang dimiliki manusia yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. *Human capital* merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

UNMAS DENPASAR

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah *human capital*. *Human capital* merupakan modal yang dimiliki manusia seperti pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expertise*), kemampuan (*ability*) dan keterampilan (*skill*) yang menjadikan manusia atau karyawan sebagai modal atau asset suatu perusahaan. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan, karyawan yang dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. *Human capital* (sumber daya manusia) adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan *human capital* (sumber daya manusia) sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. *Human capital* (sumber daya manusia) yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh *human capital* dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga mengakibatkan kualitas laporan menjadi buruk.

Human capital memegang peran penting bagi jalannya laporan keuangan. Karena di dalam laporan keuangan, *human capital* (sumber daya manusia) akan menjadi sistem laporan keuangan. Peran manusia sebagai *human capital* pada laporan keuangan sangatlah penting karena manusia harus mempunyai modal dalam segala aspek. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, *human capital* (sumber daya manusia) sangat dibutuhkan untuk diolah menjadi sumber daya

UNMAS DENPASAR

yang bernilai tinggi dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Tingkat pemahaman akuntansi termasuk ke dalam sumber daya manusia karena harus kompeten dalam mendukung keberhasilan laporan keuangan. Semakin berkualitas *human capital* yang dimiliki maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan begitu juga sebaliknya jika *human capital* yang dimiliki rendah maka akan membuat laporan keuangan yang dibuat kurang berkualitas (Wibawa, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian Yudianta dan Erawati (2012), Herawati, dkk. (2014), Maksyur (2015), Kiranayanti dan Erawati (2016) yaitu *human capital* (sumber daya manusia) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheta (2017), Wijayanti (2017) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *human capital* (sumber daya manusia) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang menentukan kualitas laporan keuangan adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan standar atau ukuran yang menggambarkan susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana dan berbagai laporan keuangan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi tersebut berguna bagi organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam merencanakan, mengelola dan mengendalikan organisasi. Sistem informasi akuntansi pemerintah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem informasi akuntansi pemerintah dibuat dengan tujuan mendukung aktivitas rutin suatu instansi pemerintahan serta pemenuhan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Kualitas sistem informasi akuntansi adalah integrasi semua unsur dan sub-unsur yang terkait dalam membentuk sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Kualitas sistem informasi akuntansi terdiri dari komponen sistem informasi akuntansi yaitu *hardware, software, brainware, telecommunication network* dan *data base* yang berkualitas serta *quality of work* dan *satisfication of users.* Sistem informasi akuntansi berkualitas apabila bersifat fleksibel, efisien, mudah diakses dan tepat waktu. Sistem informasi akuntansi memiliki peranan yang sangat potensial dalam pengembangan dan penyediaan informasi sebagai pengendalian manajemen dan membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Lembaga keuangan mulai memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer, salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa pekraman dimana lembaga ini melakukan kegiatan operasionalnya di lingkungan desa untuk melayani masyarakat desa setempat. LPD bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi pada masyarakat desa melalui pemberian kredit maupun simpanan dalam bentuk tabungan. Terdapat dimensi dari kualitas sistem informasi akuntansi ada 3 (tiga) yaitu terdiri dari efisiensi, *accessibility* (kemudahan akses), dan *integration* (integrasi). Semakin baik kualitas sistem informasi akuntansi, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Sementara itu, semakin rendah kualitas sistem informasi akuntansi, maka akan semakin rendah pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian Tomasoa (2021), Lestari dan Dewi (2020), Rohmah, dkk. (2020), Untary dan Ardiyanto (2015),

UNMAS DENPASAR

Juwita (2013) yang menyatakan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Diani (2014) hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang menentukan kualitas laporan keuangan adalah peran badan pengawas. Pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Setiap LPD harus mempunyai pengendalian intern yang memadai dan mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang akan dapat merugikan perusahaan dan terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat. Peranan badan pengawas internal sebagai pengawas internal sangat strategis, disamping sebagai auditor internal juga sebagai partner yang bersinergi untuk memajukan LPD.

UNMAS DENPASAR

Peran badan pengawas intern dalam mengawasi operasional LPD bisa dilakukan oleh siapa saja di desa pakraman bersangkutan tanpa mengenal jenjang dan jenis pendidikan. Semakin besar *aset* LPD maka ruang lingkup pengawasan menjadi semakin luas dan kompleks, dengan sendirinya memerlukan pengetahuan dan kompetensi yang semakin khusus. Hal ini disebabkan karena internal auditor akan meningkatkan jam kerja ketika manajemen memiliki insentif tinggi untuk melakukan kesalahan dalam laporan. Audit internal dapat mengurangi perilaku akuntansi agresif yang dilakukan

manajemen. Keterlibatan fungsi audit internal dalam proses laporan keuangan menghasilkan transparansi yang lebih tinggi pada operasi perusahaan. Adanya keterlibatan fungsi audit internal mengarahkan pada lingkungan yang lebih terkontrol dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Peran badan pengawas internal secara aktif mengawasi kebijakan, operasional, praktik akuntansi, laporan keuangan dan menjadi penghubung antara pengelola dengan auditor eksternal bila diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari penelitian Lestari dan Dewi (2020), Triyani dan Pratami (2018), Evelin (2017), menyatakan bahwa fungsi audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Pratiwi, dkk. (2021), hasil penelitiannya menyatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat adalah LPD. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman di mana usahanya bergerak dibidang perkreditan, memungut tabungan dan disalurkan lewat kredit yang efektif dan terarah, agar mampu membantu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. LPD mempunyai fungsi yang sama dengan bank, hanya LPD merupakan badan usaha milik desa pakraman. Pemilihan LPD sebagai tempat penelitian karena LPD merupakan lembaga keuangan yang berbasis budaya dan menjalankan usahanya berdasarkan perda yang berlaku. Perkembangan LPD setiap tahun begitu pesat dan semakin tumbuh, hampir setiap desa adat/pakraman di Bali sudah memiliki LPD. Dengan melihat

UNMAS DENPASAR

perkembangan begitu pesat sudah sepantasnya LPD tersebut dikelola secara profesional agar kemajuan LPD semakin meningkat, baik dari segi sumber daya manusia maupun manajemen, sehingga para pengelola LPD mampu bersaing pada tingkat yang lebih tinggi dan memberi dampak-dampak terhadap desa adat pada khususnya dan Bali pada umumnya terjadi pertumbuhan perekonomian di pedesaan.

LPD menyatakan bahwa LPD cocok menggunakan SAK ETAP. Karena tujuan dari SAK ETAP sendiri yakni untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum dan tidak tunduk terhadap Undang-undang tersebut yang dimana mengharuskan untuk melakukan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, menggunakan standar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk akuntabilitas publik. SAK ETAP, dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal(kreditur, pemeringkat kredit, pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha).

UNMAS DENPASAR

LPD sebagai lembaga keuangan komunitas masyarakat hukum adat Bali, LPD sebagai lembaga keuangan mikro, LPD sebagai lembaga keuangan yang bersifat sangat khas, hanya ada satu jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan komunitas yang berbentuk dan diselenggarakan oleh dan untuk komunitas desa pakraman. LPD merupakan Badan Usaha Milik Desa Adat/Pakraman yang beroperasi atau bergerak dibidang perkreditan dan tidak

semata-mata bergerak di ranah ekonomi/sosial ekonomi, akan tetapi ada misi yang sangat penting yaitu menjaga kehidupan berbudaya. Dihubungkan dengan persoalan dimensi hubungan manusia dengan Tuhan atau juga disebut dengan Tri Hita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan.

Kualitas laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan terkait operasional entitas atau organisasi, salah satu entitas yang sangat penting memiliki laporan keuangan yang berkualitas adalah lembaga keuangan lokal yang berasal dari Bali, yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Saat ini Indonesia memiliki lembaga keuangan lokal yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD adalah suatu badan perekonomian desa di mana berfungsi sebagai suatu wadah penyimpanan dana, penyaluran kredit, serta sumber pendanaan dalam rangka suatu pembangunan desa yang ada di Bali. LPD menyediakan dana untuk operasional serta dalam rangka mencapai tujuan memberikan manfaat kepada warga desa adat. Manajemen LPD sama halnya dengan pemerintahan Desa Adat, yakni atas dasar prinsip kekeluargaan dan pelayanan jasa keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling percaya.

UNMAS DENPASAR

Kualitas laporan keuangan LPD merupakan hal penting sebagai salah satu indikator akan penilaian kinerja. Kemampuan LPD menjalankan kegiatan usahanya tercermin dari kualitas laporan usahanya. Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik seorang pemimpin berperan besar untuk mengendalikan keuangan di LPD tersebut, dan diperlukan audit internal dari

badan pengawas untuk mengecek laporan keuangan setiap bulannya serta diperlukan seorang *accounting* atau pembuat laporan yang handal dan sudah memahami dengan baik akuntansi. Beberapa faktor diatas akan menunjang kualitas laporan keuangan yang baik dan bermutu bagi LPD. Jika kualitas laporan keuangannya baik, maka dapat menjalankan usaha LPD tersebut secara terus menerus.

Berdasarkan sumber LPLPD Kota Denpasar (2020) fenomena kenaikan dan penurunan laba pada LPD di Kota Denpasar periode tahun 2016- 2019. LPD di kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Barat selama tahun 2016-2019 mengalami kenaikan pertumbuhan laba. Sedangkan LPD di kecamatan Denpasar Utara mengalami penurunan laba di tahun 2018 sebesar 4,75 % dan LPD di kecamatan Denpasar Selatan sebesar 4,36 % di tahun 2018. Maka dengan itu kualitas laporan keuangan pada LPD harus ditingkatkan agar tidak terjadi kenaikan dan penurunan pada laba. Masih terdapat LPD yang kurang sehat dengan kasus dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Serangan yang terjadi pada periode 2015-2020 mulai dipelototi Kejari Denpasar.

UNMAS DENPASAR

Motivasi penelitian ini menggunakan *research gap*, karena adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya. Faktor pertama apakah *human capital* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) yaitu *human capital* (sumber daya manusia) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheta (2017), hasil penelitiannya menyatakan bahwa *human capital* (sumber daya manusia) tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor kedua apakah kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian Tomasoa (2021) yang menyatakan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Diani (2014) hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor ketiga apakah kualitas fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari penelitian Lestari dan Dewi (2020) menyatakan bahwa fungsi audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Pratiwi, dkk. (2021), hasil penelitiannya menyatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Human Capital*, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas terhadap Kualitas Laporan Keuangan di LPD Kota Denpasar. Peneliti memilih meneliti di kota Denpasar, karena Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali, Denpasar merupakan pusat kota, pendidikan perekonomian, dan pariwisata. Dengan letak geografis yang sangat strategis dan penghubung antara Kabupaten.

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1) Apakah *human capital* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?
2) Apakah kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?
3) Apakah fungsi badan pengawas internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *human capital* terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?

2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?

3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh fungsi badan pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris terhadap teori keagenan *(agency theory)* yaitu terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agent sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau *agency problem*. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat memonitoring untuk mengurangi adanya *agency cost*. Sehingga diperlukannya *human capital* (sumber daya manusia) dalam memiliki modal pengetahuan yang baik di seluruh intansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan rakyat (prinsipal) dan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada rakyat seperti menghasilkan laporan keuangan LPD yang berkualitas.

UNMAS DENPASAR

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen LPD sebagai pertimbangan untuk langkah selanjutnya agar lebih etis dan profesional terutama dalam kualitas laporan keuangan. Serta dapat memberi masukan kepada pihak perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan lagi dalam pembuatan laporan keuangan yang benar dan berkualitas agar dapat dengan mudah di pahami oleh siapa saja yang

membaca laporan keuangan tersebut, termasuk para kreditur, debitur ataupun para investor.

UNMAS DENPASAR

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan (agency theory)

Teori keagenan *(agency theory)* digunakan untuk menjelaskan bahwa adanya hubungan antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada rakyat selaku pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Teori agen berpendapat bahwa dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agent sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau *agency problem*. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat memonitoring untuk mengurangi adanya *agency cost.*

UNMAS DENPASAR

Dalam teori agency mendukung adanya keterkaitan antara *human capital* (sumber daya manusia) dengan kualitas laporan keuangan LPD, teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa adanya hubungan antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen, sehingga diperlukannya *human capital* (sumber daya manusia) dalam memiliki modal pengetahuan yang baik di seluruh intansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan rakyat (prinsipal) dan memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada rakyat seperti menghasilkan laporan keuangan LPD yang berkualitas.

2.1.2 Human Capital

Human Capital (sumber daya manusia) dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan karyawan. *Human Capital* (sumber daya manusia) menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan dan kadar pengetahuan, pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimiliki. *Human Capital* (sumber daya manusia) dapat diukur dari keberhasilan peningkatan kemampuan teoritis, peningkatan kemampuan teknik, peningkatan kemampuan konseptual, peningkatan moral dan peningkatan keterampilan teknik. Asset pengetahuan yang dimiliki perusahaan terdapat pada *human capital* (sumber daya manusia). Pengelolaan *human capital* (sumber daya manusia) yang baik, dapat menjadikan sumber daya manusia sebagai aset atau modal sebuah perusahaan. Pemanfaatan *human capital* (sumber daya manusia) sebagai modal utama perusahaan dapat membuat tercapainya tujuan dari perusahaan. Aktivitas yang dapat digunakan untuk memudahkan pencapaian suatu perusahaan adalah salah satunya pelaksanaan target kinerja karyawan di dalam perusahaan. *Human capital* (sumber daya manusia) yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang berkompeten, yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, sehingga mampu menyusun sebuah laporan keuangan yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

UNMAS DENPASAR

2.1.3 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi dikatakan efektif apabila informasi yang dibutuhkan pengguna sistem terpenuhi dan sistem informasi akuntansi dikatakan efisien apabila sistem tersebut dapat menghasilkan informasi yang tidak membutuhkan banyak waktu dalam proses pekerjaannya. Terdapat beberapa dimensi dari kualitas sistem informasi akuntansi ada 3 (tiga) yaitu terdiri dari efisiensi, *accessibility* (kemudahan akses), dan *integration* (integrasi). Sistem informasi akuntansi berkualitas apabila bersifat fleksibel, efisien, mudah diakses dan tepat waktu. Semakin baik kualitas informasi, akan semakin baik pula keputusan yang diambil. Apabila informasi yang dihasilkan tidak berkualitas maka akan berpengaruh negatif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi.

2.1.5 Fungsi Badan Pengawas

UNMAS DENPASAR

Peranan badan pengawas internal sebagai pengawas internal sangat strategis, di samping sebagai auditor internal juga sebagai partner yang bersinergi untuk memajukan LPD. Peran badan pengawas intern dalam mengawasi operasional LPD bisa dilakukan oleh siapa saja di desa pekraman bersangkutan tanpa mengenal jenjang dan jenis pendidikan. Semakin besar aset LPD maka ruang lingkup pengawasan menjadi semakin luas dan kompleks. Mengingat pentingnya peranan badan pengawas intern, maka ia harus memiliki kejelasan dalam struktur organisasi yang ada, keahlian teknis, dan pola pikir

yang membuat mampu menjalankan tata kelola, bimbingan, dan tanggung jawab. Sesuai dengan pasal 1 ayat (11) Perda No.3 tahun 2007, yang dimaksud pengawasan internal adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. Divisi audit pada LPD adalah badan pengawas internal yang sering disebut dengan Badan Pengawas Desa yang secara kelembagaan harus memahami seluruh elemen pengendalian yang terdiri dari evaluasi pengelolaan risiko, evaluasi pengendalian, dan evaluasi proses *governance.*

Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 491 Tahun 1998 mengenai Pembentukan dan Kedudukan Badan Pengawas adalah sebagai berikut, di tiap-tiap LPD dibentuk badan pengawas LPD;

1) Badan pengawas terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 2 orang anggota.
2) Bendesa adat sebagai ketua badan pengawas.
3) Ketua dan anggota badan pengawas tidak dibenarkan merangkap sebagai badan pengurus LPD.

UNMAS DENPASAR

Tugas dari badan pengawas LPD adalah:

1) Mensosialisasikan keberadaan LPD.
2) Memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD.
3) Mengawasi proses penyaluran kredit dan penanganan kredit macet atau bermasalah.

Seorang pengawas LPD memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab terlaksananya rencana program bidang pengawasan.

2) Bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja personalia bidang pengawasan .
3) Bertanggung jawab berkembangnya asset yang dimiliki oleh LPD.
4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan standar operasional dan prosedur bidang pengawasan.
5) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional bidang pengawasan.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan *(financial statement)* adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggung jawaban *(stewardship)* manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

UNMAS DENPASAR

Dalam menyusun sebuah laporan keuangan berkualitas, terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus diperhatikan, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam

pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan meliputi neraca, laba – rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.7 Lembaga Perkreditan Desa

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984, di sana disebutkan LPD adalah alat desa dan merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat berharga lainnya, dan selanjutnya Perda Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 12 September 2002 serta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No 3 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu wadah kekayaan desa menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha – usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berkembang sejak tahun 1985 yang dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali No.8 Tahun 2002 juga tercantum fungsi dan tujuan LPD antara lain, mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan, meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada krama desa dan di dalam melaksanakan dan mengelola LPD pengurus dapat mengangkat karyawan dalam membantu kegiatan operasional lembaga. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002

UNMAS DENPASAR

menyebutkan bahwa kegiatan – kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh LPD adalah sebagai berikut:

1) Menerima dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
2) Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa.
3) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan modal.
4) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang mengaitkan pengaruh *human capital* (sumber daya manusia), kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan, untuk itu berikut penjelasan penelitian sebelumnya yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

UNMAS DENPASAR

Pratiwi, dkk. (2021) melakukan penelitian untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawasan, profesionalisme dan etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh LPD yang berada di kecamatan marga, yaitu sebanyak 23 LPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa

tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan profesionalisme dan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Marga.

Tamasoa (2021) melakukan penelitian pengaruh peran internal audit, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Populasi SKPD Kota Ambon jumlah responden sebanyak 39 kuesioner dengan menggunakan metode sensus. Hasil menunjukan pengaruh peran internal audit, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pebriantari dan Andayani (2021) melakukan penelitian tentang fungsi badan pengawas internal, tingkat pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Gianyar. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan LPD yang berada di Kecamatan Gianyar, yaitu sebanyak 34 LPD. Terdapat 102 responden teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa fungsi badan pengawas internal, tingkat pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Badung.

Lestari dan Dewi (2020) dengan variabel pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas

UNMAS DENPASAR

laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah 108 responden pada BPKAD Kabupaten Badung Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 60 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukan bahwa pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sinaranata, dkk. (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawasan, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di LPD Di Kecamatan Penebel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan penentuan sampel menggunakan sampling jenuh sebanyak 33 sampel. Hasil penelitian menunjukan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh sedangkan fungsi badan pengawasan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

UNMAS DENPASAR

Mardiana dan Fahlevi (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini dilakukan di SKPK Banda Aceh dengan populasi 39 SKPK Banda Aceh dengan sampel 76. Penentuan sampel menggunakan metode sensus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Wibawa (2017) menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. Variabel bebas (independen) adalah kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem akuntansi daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem akuntansi daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Wijayanti (2017) membuktikan hubungan 3 (tiga) variabel bebas (independen) yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi dengan 1 (satu) variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik yang digunakan teknik sampling jenuh jumlah sebanyak 86 orang pegawai. Hasil analisis menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan sedangkan sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

UNMAS DENPASAR

Nugraheta (2017) melakukan penelitian tentang variabel pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Penelitian ini dilakukan di SKPD Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil pada SKPD Kota Surakarta dengan menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 115 eksemplar yang dibagikan kepada pegawai di bagian bendahara pengeluaran dan pegawai laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Surakarta, sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Surakarta.

UNMAS DENPASAR

Septiana (2017) menjelaskan hubungan 2 (dua) variabel bebas (independen) yaitu kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal dengan variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di SKPD sawahlunto. Populasi didalam penelitian ini adalah 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Sawahlunto. Teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan metode total sampling. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi

berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan beberapa variabel independen yang sama seperti *human capital* (sumber daya manusia), kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawasan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kualitas laporan keuangan. Persamaan juga terdapat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian sebelumnya diteliti dari tahun 2021, 2020, 2019, 2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pertama penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian ini seperti penerapan sistem pengendalian intern, profesionalisme, penerapan standar akuntansi, etika kepemimpinan, teknologi informasi, efektivitas penerapan SAP, komitmen organisasi. Kedua, ada yang menggunakan variabel dependen yaitu dengan menggunakan pelaporan keuangan. Ketiga, jika dilihat dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan pada LPD di Kota Denpasar, sedangkan penelitian sebelumnya diteliti pada LPD yang berada di Kecamatan Marga, SKPD Kota Ambon, LPD di Kecamatan Gianyar, BPKAD Kabupaten Badung, LPD Di Kecamatan Penebel, SKPK Banda Aceh, DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, SKPD Kota Surakarta, SKPD Kota Sawahlunto.

UNMAS DENPASAR